BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat *Return On Assets*

1. Pengertian *Return On Assets* (ROA)

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya peroleh keuntungan perusahaan.[12]

Meski ada beragam indikator penilaian profitabilitas yang lazim digunakan oleh bank, Dalam penelitian ini ROA adalah sebagai indikator profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah karena ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan danuntuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya, sehingga indikator ini sesuai dengan industri perbankan.

ROA dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai

[12] Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung, Alfabeta, 2011), hlm.135

bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, apabila ROA yang negatif disebabkanlaba perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi, hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba.

ROA juga memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitasnya dan manajerial efisiensi secara menyeluruh. Dan juga penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari aspek rentabilitas/profitabilitas dilakukan dengan menggunakan indikator ROA.Rasio ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan *asset*.

ROA merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentudan menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah

efisien dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan..

Jadi, jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan.Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan perusahaan tersebut. ROA menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh *asset* yang dimiliki perusahaan.

ROA digunakan oleh manjemen perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA memiliki keuntungan yaitu ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. Keunggulan lain yang didapat daripengukuran kinerja dengan ROA adalah perhitungan ROA sangat mudah dihitungdan dipahami. ROA juga merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

ROA juga merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran

produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Adapun rumus ROA adalah:[13]

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Rata-rata jumlah harta}}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan.

Adapun kelebihan dan kelemahan *Return on Assets* (ROA)diantaranya sebagai berikut:

a. Kelebihan *Return on Assets* (ROA)
    1. ROA mudah dihitung dan dipahami.
    2. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
    3. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.

[13] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.159

4. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan *assets* yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
5. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
6. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

b. Kelemahan *Return on Assets* (ROA)

1. Kurang mendorong manajemen untuk menambah *assets* apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
2. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.[14]

Sehingga, alasan peneliti menggunakan ROA dikarenakan BI sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan aset yang dananya berasal dari masyarakat. Disamping itu ROA merupakan metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkanhasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan.

[14] Bambang Susanto, *Manajeman Akuntansi*, (Jakarta: Sansu Moto, 2005), hlm.45

B. Hakikat Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus. Adapun Roger G. Ibbotson dan Gary P. Brinson mengatakan *inflation is a sustainedincrease in the general price level over time*. Lebih jauh Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri mengatakan inflasi adalah suatu keadaan di mana nilai uang menurun secara terbuka, akibat harga-harga barang umumnya naik.[15]

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada harga lainnya. Ketika inflasi tinggi maka akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan menaikkan tingkat suku bunga. Tingginya tingkat suku bunga akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai mediasi,

---

[15] Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Teori dan Soal Jawab*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.21

bank sangat rentan dengan resiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya.[16]

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*).[17]

Pada dasarnya, terjadinya inflasi bukanlah masalah yang terlalu berarti apabila keadaan tersebut diiringi oleh tersedianya komoditi yang diperlukan secara cukup dan diimbangi dengan naiknya tingkat pendapatan yang lebih besar dari tingkat inflasi tersebut. Akan tetapi, manakala biaya produksi untuk menghasilkan komoditi semakin tinggi untuk menjadikan harga jualnya relatif tinggi sementara disisi lain tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap, maka barulah inflasi ini menjadi sesuatu yang menakutkan.

---

[16] Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.147

[17] Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.135

Bila kondisi tersebut terjadi maka daya beli masyarakat akan menurun, sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk menginvestasikan dana mereka. Mereka lebih memilih membelanjakan dana mereka untuk mencukupi kebutuhannya. Kondisi inilah yang mempengaruhi tingkat pengembalian bank.

2. Jenis-jenis Inflasi

   a) Menurut sifatnya, inflasi dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu:

      1) Inflasi merayap/rendah (*creeping inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun.

      2) Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10 – 30% pertahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30%, dan sebagainya.

      3) Inflasi berat (*high inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30 – 100% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan bahkan menurut istilah ibu-ibu rumah tangga harga berubah.

      4) Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi

menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.[18]

b) Berdasarkan asalnya, inflasi digolongkan menjadi dua, yaitu:

1) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*Imported Inflation*). Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan harga di luar negeri yang menyebabkan kenaikan harga di dalam negeri. Inflasi semacam ini biasanya dialami negara-negara berkembang yang sebagian bahan bakunya dari luar negeri.

2) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*Domestic Inflation*). Inflasi ini disebabkan faktor-faktor di dalam negeri, antara lain:

a. Terjadi defisit anggaran secara terus-menerus, defisit anggaran ini bisa jadi ditutup dengan mencetak uang baru. Penciptaan uang baru yang berlebihan, sebagaimana kita tahu, dapat menyebabkan inflasi.

b. Terjadi gagal panen, gagal panen dapat mengurangi penawaran barang di pasar. Bila permintaan lebih tinggi dari penawaran, pada akhirnya harga akan meningkat. Inflasi akan terjadi.

c. Kredit untuk keperluan produksi dibatasi, kondisi semacam ini akan mengakibatkan harga barang dari waktu ke waktu semakin naik. Karena harga naik, para produsen cenderung akan menyimpan barangnya untuk mendapatkan harga yang

[18] Iskandar Putong, *Ekonomi Makro.....,* hlm.260

setinggi-tingginya. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara permintaan barang oleh konsumen dengan barang yang disediakan oleh produsen. Harga pun akan naik.

c) Berdasarkan sebabnya, inflasi digolongkan menjadi:

1) Kenaikan permintaan (*Demand-pull Inflation*). Inflasi terjadi karena permintaan masyarakat terhadap berbagai barang lebih besar daripada penawaran barang, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Agar keseimbangan terjadi maka harga barang naik. Inflasi ini bisa muncul karena beberapa hal. Terlalu banyaknya uang yang dialirkan bank sentral bisa menyebabkan inflasi. Meningkatnya anggaran belanja negara dan ekspansi bisnis juga dapat meningkatkan permintaan barang secara keseluruhan. Inflasi juga dapat terjadi jika pajak diturunkan atau konsumen enggan menabung dan lebih suka membeli barang lebih banyak.

2) Kenaikan biaya produksi (*Cost-push Inflation*). Kenaikan harga-harga faktor produksi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi, mendorong produsen untuk menaikkan harga jual di setiap titik produksinya. Kenaikan harga jual ini akan mengakibatkan keseimbangan pasar berubah, di mana harga sekarang menjadi lebih mahal dibandingkan keseimbangan sebelumnya.

3) Ekspektasi masyarakat (*Expectation*). Apa yang masyarakat prediksikan di masa yang akan datang ternyata sangat berpengaruh terhadap keputusannya sekarang. Fakta bahwa ekspektasi masyarakat dapat mempengaruhi inflasi sangatlah tidak menguntungkan bagi perekonomian, terutama bila masyarakat atau perusahaan mendasarkan ekspektasinya pada kejadian masa lalu. Ketika terjadi kenaikan harga, masyarakat akan terus berekspektasi bahwa harga akan terus naik.[19]

3. Metode Perhitungan Inflasi

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjualbelikan di pasar dengan masingmasing tingkat harga (barang-barang ini tentu saja yang paling banyak dan merupakan kebutuhan pokok/utama bagi masyarakat). Berdasarkan data harga itu disusunlah suatu angka yang diindeks. Angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh konsumen pada masingmasing harganya disebut sebagai indeks harga konsumen (IHK atau *consumer price index* = CPI). Berdasarkan indeks harga konsumen dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu. Biasanya setiap bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Selain menggunakan IHK, tingkat inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan GNP atau PDB deflator, yaitu membandingkan GNP atau PDB yang diukur

[19] Wahyu Adji, et. All., *Ekonomi untuk SMA/MA Jilid 1 Kelas X*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), hlm.193-197

berdasarkan harga berlaku (GNP atau PDB nominal) terhadap GNP atau PDB harga konstan (GNP atau PDB riel).

Adapun rumus untuk menghitung tingkat inflasi adalah:

In = $\frac{IHK_{n-IHK_{n-1}}}{IHK_{n-1}}100\%$ In = $\frac{Df_{n-Df_{n-1}}}{Df_{n-1}}100\%$

In adalah inflasi, IHKn indeks harga konsumen tahun dasar (dalam hal ini nilainya 100), IHKn-1 adalah indeks harga konsumen tahun berikutnya. Dfn adalah GNP atau PDB deflator tahun berikutnya, Dfn-1 adalah GNP atau PDB deflator tahun awal (sebelumnya).[20]

4. Dampak Inflasi

a) Dampak Negatif

Bila harga barang secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di *rush*, akibatnya bank kekurangan dana dan berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia.

Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan caramempermainkan

[20] Iskandar Putong, *Ekonomi Makro.....,* hlm.254-255

harga di pasaran, sehingga harga akan terus menerus naik. Namun, bila inflasi berkepanjangan, maka produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli.

Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki uang banyak. Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan.

b) Dampak Positif

1) Bagi pengusaha barang-barang mewah (*high end*) yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi (masalah *prestise*).
2) Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan.
3) Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh.

4) Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan bergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha.[21]

5. Cara Mengatasi Inflasi

Dalam batas-batas tertentu inflasi memang menguntungkan, karena pada dasarnya inflasi yang terkendali akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika sudah dalam taraf yang membahayakan, inflasi harus segera diatasi. Adapun cara mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut.

a) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan (melalui bank sentral) untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam suatu sistem perekonomian. Bentuk kebijakan moneter yang dilakukan untuk mengatasi inflasi antara lain sebagai berikut:

1) Penetapan Cadangan Minimum (*Reserve Requirement Policy*). Bank sentral mewajibkan bank umum untuk menaruh sejumlah dananya, menurut persentase tertentu dari seluruh dana yang dihimpunnya di bank sentral. Bila bank sentral ingin memperkecil jumlah uang beredar di masyarakat, bank sentral bisa menaikkan tingkat cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum. Dengan demikian, dana yang dapat

[21] *Ibid*., hlm.263

disalurkan oleh bank umum semakin kecil, yang pada akhirnya jumlah uang beredar semakin sedikit.

2) Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*). Bank sentral juga dapat melakukan intervensi di pasar uang melalui operasi pasar terbuka. Intervensi ini antara lain dilakukan dengan menjual berbagai surat berharga seperti obligasi, SBI, dan SBPU. Dengan demikian, uang masyarakat akan tersedot ke bank sentral sehingga jumlah uang beredar akan berkurang.

3) Kebijakan Diskonto (*Discount Policy*). Sebagai *the lender of lastresort*, bank sentral dapat meminjamkan dananya kepada bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas, dengan mengenakan tingkat bunga (*discount rate*) tertentu. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral dapat menaikkan tingkat bunga peminjaman yang dikenakan kepada bank umum. Sebagai akibatnya, bank umum akan mengurangi peminjaman uangnya kepada bank sentral sehingga jumlah uang yang beredar semakin sedikit.

b) Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh dalam mengatasi inflasi antara lain sebagai berikut:

1) Menurunkan pengeluaran pemerintah. Pengurangan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan berkurangnya

permintaan barang dan jasa. Pada saat permintaan tersebut berkurang, maka jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang yang pada akhirnya mampu menekan tingkat inflasi.

2) Menaikkan pajak. Kebijakan pemerintah menaikkan pajak akan mengurangi pendapatan masyarakat yang dapat dibelanjakan (*disposable income*). Turunnya pendapatan masyarakat ini akan mendorong masyarakat untuk mengurangi permintaan konsumsinya. Pada akhirnya, jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang dan inflasi dapat diturunkan.

c) Kebijakan Non-moneter atau Kebijakan Riil. Kebijakan riil merupakan kebijakan di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bentuk kebijakan riil dalam mengatasi inflasi antara lain:

1) Menaikkan hasil produksi. Inflasi terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Permintaan akan barang terjadi lebih besar dibandingkan dengan penawaran sehingga harga naik. Dengan demikian, bila produksi dapat ditingkatkan, maka permintaan masyarakat akan dapat dipenuhi sehingga pada akhirnya tidak terjadi inflasi.

2) Mengendalikan harga. Agar harga tidak naik, pemerintah dapat mengendalikan harga dengan cara pengawasan. Pemerintah akan menetapkan harga tertinggi yang boleh ditetapkan pengusaha. Bila hal ini dilanggar, maka pemerintah akan mengambil tindakan. Namun tanpa pengawasan yang baik, cara

yang digunakan pemerintah ini dapat menimbulkan pasar gelap *(black market*).[22]

C. Hakikat BI *Rate*

1. Pengertian BI *Rate*

Menurut situs Bank Indonesia, BI *Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan.[23]

BI *rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI *rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti

---

[22] Wahyu Adji, et. all., *Ekonomi untuk SMA/MA.....,* hlm.198-201
[23] RH Liembono, *Analisis Fundamental.....,* hlm.108

oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI *rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI *rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI *rate* (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 *basis poin* (bps)). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI *rate* dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.[24]

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (nasabah yang memilliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

---

[24] Penjelasan dari Bank Indonesia, *"Penjelasan BI Rate sebagai Suku Bunga Acuan"* dalam www.bi.go.id diakses tanggal 15 April 2019

a. Bunga Simpanan

Bunga Simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

b. Bunga Pinjaman

Bunga Pinjaman dalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya. [25]

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh

[25] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.121-122

faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.
b. Persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, pihak perbankan juga harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan harus dinaikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman harus berada di bawah bunga pesaing.
c. Kebijaksanaan pemerintah. Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
d. Target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

e. Jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

f. Kualitas jaminan. Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebalilknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila 31 kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

g. Reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

h. Produk yang kompetitif. Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

i. Hubungan baik. Biasanya bank menggolongkan nasabahnya, antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

j. Jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang *bonafid* atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.[26]

3. Komponen-komponen dalam Menentukan Bunga Kredit

Dalam menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur terdapat beberapa komponen yang perlu memperoleh perhatian. Komponen-komponen ini ada yang dapat diminimalkan dan ada pula yang tidak sama sekali.

Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain:

[26] *Ibid.,* hlm.122-124

a. Total biaya dana (*Cost of Fund*). Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan maka semakin tinggi pula biaya dananya, demikian pula sebaliknya. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau *reserve requirement* (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini besarnya RR yang ditetapkan pemerintah besarnya 5%.
b. Biaya operasi. Dalam melakukan setiap kegiatan, setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.
c. Cadangan resiko kredit macet. Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Resiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu pihak bank perlu mencadangkannya

sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan.

d. Laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank di samping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai, misalnya jika proyek pemerintah atau untuk pengusaha/rakyat kecil maka labanya pun berbeda dengan yang komersil.

e. Pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.[27]

4. Jenis-jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kredit-nya. Pembebanan di sini maksudnya metode perhitungan yang akan digunakan, sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran perbulannya. Di mana jumlah angsuran terdiri dari hutang/pokok pinjaman dan bunga. Metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

[27] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.41-42

a. *Sliding rate*. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Cicilan nasabah (pokok pinjaman ditambah bunga) otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis *sliding rate* ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud si nasabah tidak merasa terbebani terhadap pinjamannya.

b. *Flat rate*. Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *flatrate* ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi atau kredit konsumtif lainnya.

c. *Floating rate*. Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap cicilannya setiap bulan.[28]

[28] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan.....,* hlm.127-128

D. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.[29]

Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu perbankan dan syariah. Kata perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesusai dengan hukum Islam.[30]

Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

---

[29] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2005), hlm.13

[30] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 UU No.21/2008 dijelaskan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya dalam UU yang sama dijelaskan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, dan (5) jasa (*fee*).[31]

Pada sistem operasional bank syariah yang berlandaskan pada kelima prinsip syariah di atas, secara umum produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a) Produk Pendanaan, meliputi: pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* (giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*), pendanaan dengan prinsip *qardh*, pendanaan dengan prinsip *mudharabah* (tabungan

[31] *Ibid*., hlm.86

mudharabah, deposito/investasi umum (tidak terikat), deposito/investasi khusus (terikat) dan *sukuk al-mudharabah*), dan pendanaan dengan prinsip *ijarah* (*sukuk al-ijarah*).

b) Produk Pembiayaan, meliputi: pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam,* dan *istishna'*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan IMBT).

c) Produk Jasa Perbankan, meliputi: jasa keuangan, antara lain *qardh* (dana talangan), *hiwalah* (anjak piutang), *wakalah* (L/C, transfer, inkaso, kliring, RTGS, dan sebagainya), *sharf* (jual beli valuta asing), *rahn* (gadai), *ujr/wakalah* (*payroll*), *kafalah* (bank garansi), jasa nonkeuangan yaitu *wadiah yad amanah/ujr* (*safe deposit box*), jasa keagenan yaitu *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat (*channeling*)), jasa kegiatan sosial yaitu *qardhul hasan* (pinjaman sosial).[32]

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis perbankan syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua aspek, yaitu hukum normatif dan hukum positif.

a. Hukum Normatif

Hukum normatif yaitu sumber-sumber hukum yang menjadi landasan norma dari aktivitas keyakinan "individu" dalam

[32] Ascarya, *Akad dan Produk Bank* Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.112-129

menjalankan agamanya. Individu yang dimaksud di sini dapat berarti personal (pribadi orang per-orang) atau institusional (lembaga). Dikarenakan dalam hal ini adalah perbankan , berarti yang dimaksud hukum normatif di sini adalah yang berlaku bagi institusional bank.

Hukum normatif ini berlaku bagi setiap bank yang melabelkan *brand* "syariah". Konsekuensi yang harus dijalankan oleh setiap bank yang menggunakan syariah, maka prinsip operasional yang dikembangkan harus merujuk pada norma-norma syariah (Islam).

Hukum normatif secara umum dapat dirujuk oleh institusi perbankan syariah adalah:

1) Sumber hukum Islam yaitu *Al-Qur'an*, *Sunnah*, dan *Fiqh*.
2) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Penggunaan sumber hukum normatif dalam perbankan syariah merupakan bagian fundamental tanggungjawab yuridis, akuntabilitas dan validitas hukum perikatan (akad) yang dipraktekkan di bank syariah yang bersifat institusional tidak berbeda dengan hukum perikatan yang dilakukan oleh individual (mukallaf/muslim). Oleh karenanya fatwafatwa DSN-MUI menjadi hal yang sangat operasional dalam menciptakan perbedaan sistem antara yang syariah dan konvensional.

b. Hukum Positif

Hukum positif berarti landasan hukum yang bersumber pada undangundang tentang perbankan, undang-undang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau landasan hukum lainnya yang dapat dikategorikan sebagai hukum positif. Terdapat tiga undang-undang yang menjadi landasan hukum perbankan syariah di Indonesia, yaitu:

a) Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
b) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai amandemen dari UU No. 7/1992 tentang Perbankan.
c) Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain ketiga undang-undang yang menjadi dasar perbankan di atas, juga terbit undang-undang tentang Bank Indonesia, yaitu UU No. 3 Tahun 2004 sebagai amandemen dari UU No. 23 Tahun 1999. Landasan pendukung perundang-undangan, juga terdapat peraturan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Pemerintah (PP), serta peraturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).[33]

3. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Bank Islam sama seperti bank konvensional adalah organisasi yang bertujuan mencari keuntungan. Hanya saja, bank Islam melarang riba

[33] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.85-94

atau aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas bank Islam didasarkan pada prinsip membeli dan menjual aset.

Beberapa contoh dari perbedaan antara sistem Bank Islam dan Bank Konvensional.[34]

Tabel 2.1

Perbedaan Sistem Bank Islam dan

Sistem Bank Konvensional

Karakteristik	Sistem Bank Islam	Sistem Bank Konvensional
Kerangka bisnis	Fungsi dan operasi didasarkan pada hukum syariah. Bank harus yakin bahwa semua aktivitas bisnis adalah sesuai dengan tuntutan syariah.	Fungsi dan operasi didasarkan pada prinsip sekuler dan tidak didasarkan pada hukum atau aturan suatu agama.
Melarang bunga dalam pembiayaan	Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga dan didasarkan pada prinsip pembelian dan penjualan aset, di mana harga pembelian termasuk *profitmargin* dan bersifat tetap dari semula.	Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga tetap atau bergerak yang dikenakan kepada orang yang menggunakan uang.
Melarang bunga pada penyimpanan	Penyimpanan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan atau kerugian di mana investor dibagi persentase keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Bank memperoleh kembali hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang dia ambil bagian	Nasabah berorientasi pada bunga dan investor diyakinkan untuk menentukan dari semula tingkat bunga dengan jaminan pembayaran kembali pokok pembayaran.

[34]Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm.38-40

	selama periode aktivitas dari usaha tersebut.	
Pembagian pembiayaan dan risiko yang sama	Bank menawarkan kesamaan pembiayaan untuk suatu usaha/ proyek. Kerugian dibagi berdasarkan persentase bagian yang disertakan, sedangkan keuntungan berdasarkan persentase yang sudah ditentukan di awal.	Tidak secara umum menawarkan tapi memungkinkan untuk perusahaan modal venture dan *Investment banks*. Umumnya mereka mengambil bagian dalam manajemen.
Restrictions (Pembatasan)	Bank Islam dibatasi untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah.	Tidak ada pembatasan.
Zakat	Bank tidak boleh membiayai bisnis yang terlibat dalam perjudian dan penjualan minuman keras. Dalam sistem bank Islam yang modern, salah satu fungsinya Tidak berhubungan dengan zakat. adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.	Tidak berhubungan dengan zakat
Penalty on Default	Tidak mengenakan tambahan uang dari kegagalan membayar. Catatan: beberapa negara muslim mengijinkan mengumpulkan biaya *penalty* dan dibenarkan sebagai biaya yang terjadi atas pengumpulan pinalti biasanya satu persen dari jumlah cicilan.	Biasanya dikenakan tambahan biaya (dihitung dari tingkat bunga) pada kasus kegagalan membayar.
Melarang Gharar	Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan	Perdagangan dan perjanjian dari segala jenis

	spekulasi sangat dilarang. Contoh: transaksi *derivative* dilarang karena mengndung unsur spekulasi.	*derivative*atau yang mengandung unsur spekulasi diizinkan.
Customer Relations	Status bank dalam berelasi dengan *clients* sebagai *partner*/ investor dan *enterpreneur*/ pengusaha.	Status bank dalam berelasi dengan *clients* sebagai kreditor dan debitor.
Syariah *Supervisiory Board*	Setiap bank harus memiliki Syariah *Supervisory Board* untuk meyakinkan bahwa semua aktivitas bisnis adalah sejalan dengan tuntutan syariah.	Tidak dibutuhkan permintaan ini.
Statutory Requirement	Bank harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia dan juga *guidelines* Syariah.	Harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia saja.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai landasan dan pembanding dalam menganalisis variabel yang mempengaruhi cara mengukur kinerja keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Affandi[35] yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, nilai tukar, BI-*Rate* dan suku bunga konvensional terhadap *margin* bagi hasil deposito*muḍarabah*perbankan

[35] Faisal Affandi, "*Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar,BI-Rate Dan Suku Bunga Bank KonvensionalTerhadap Margin Bagi Hasil DepositoMudharabah Perbankan Syariahdi Indonesia Periode 2010-2015",* At-Tawasuth Vol.1 No.1, 2016, hlm.45-72 dalam http://www .jurnal.uinsu.ac.id diakses pada 15 Januari 2020

syariah di Indonesia periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi dan variabel suku bunga bank konvensional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *margin* bagi hasil deposito *muḍarabah* perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan variabel nilai tukar rupiah dan variabel BI-*Rate* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel margin bagi hasil deposito *muḍarabah* perbankan syariah di Indonesia.Dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu variabel penelitian yang tidak sama sedangkan persamaan yang dimiliki penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Topowijono[36]yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, *BI rate* dan nilai tukar terhadap *return* saham di perusahaan *food & beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2016 baik secara simultan maupun parsial. Harga saham selalu mengalami fluktuasi tergantung tinggi rendahnya permintaan saham. Oleh karena itu, investor perlu mempertimbangan faktor ekonomi makro seperti inflasi, BI *rate* dan nilai tukar. Dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu objek penelitian yang tidak sama sedangkan persamaan yang dimiliki penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah variabel Y, penelitian ini meneliti rasio ROA sedangkan penelitian sebelumnya meneliti *return saham*.

---

[36] Hidaya Tri Afiyati Topowijono, "*Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Terhadap Return Saham"*,Jurnal Administrasi Bisnis Vol.61 No.2, 2018, hlm.144-151, dalamhttp://www.administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id diakses pada 15 Januari 2020

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ali[37]yang bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis pengaruh tingkat rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dan bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO perpengaruh negatif terhadap ROA, NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah. CAR berpengaruh positif sifgnifikan terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA, NIM berpengaruh signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada bank konvensional Indonesia. Dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu objek penelitian yang tidak sama sedangkan persamaan yang dimiliki penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada rasio keuangan, penelitian ini hanya meneliti ROA.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sahara[38] yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh analisis inflasi, BI *rate*, dan Produk Domestik Bruto terhadap *Return On Asset* (ROA) perbankan syariah di Indonesia periode 2008-2010. Variabel ekonomi makro dalam penelitian ini diukur dengan inflasi, suku bunga Bank Indonesia, dan Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator paling penting dalam mengevaluasi

---

[37] Muhammad Ali, "*Pengaruh Rasio Kesehatan Bank TerhadapKinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional",*Vol.1 No.1, 2012, hlm.79-85, dalam http://www.academia.edu.co.id diakses pada 15 Januari 2020

[38] Ayu Yanita Sahara, "*Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah Di Indonesia"*, Jurnal Ilmu Manajemen Vol.1 No.1, 2013, hlm.149-157 dalam https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/indexdiakses pada 15 Januari 2019

kinerja keuangan perbankan adalah ROA. Dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu variabel penelitian yang tidak sama sedangkan persamaan yang dimiliki penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada rasio keuangan, yaitu sama-sama meneliti ROA.

Kelima, penelitian yang dilakukan olehSetyaningsih dan Utami[39] yang bertujuan untukmembandingkan kinerja keuangan bank syariah denganbank konvensional di Indonesia menggunakan rasio keuangan: CAR, NPL, ROA, BOPO dan LDR.Dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu akta menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara CAR, ROA, dan BOPO, sementara tidak ada yang signifikan perbedaan antara NPL dan LDR.Dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu objek penelitian yang tidak sama sedangkan persamaan yang dimiliki penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada rasio keuangan, penelitian ini hanya meneliti ROA.

Keenam, Penelitian yang dilakukan olehMuchlish dan Umardani[40] yang bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan bank syariah denganbank konvensional di Indonesia menggunakan rasio keuangan:

---

[39] Ari Setyaningsih dan Setyaningsih Sri Utami, "*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*", Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol.13 No.1, 2013, hlm.100-115 dalamhttps://media.neliti.com/media/publications/23466-ID-analisis-perbandingan-kinerja-keuangan-perbankan-syariah-dengan-perbankan-konven.pdf diakses pada 15 Januari 2020

[40] Abraham Muchlish dan Dwi Umardani, "*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia"*, Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa Vol.9 No. 1, 2016, hlm.129- 155, dalam https://media.neliti.com/media/publications/111547-ID-analisis-perbandingan-kinerja-keuangan-b.pdf diakses pada 15 Januari 2020

CAR, NPL / NPF, ROA, ROE, LDR / FDR,REO / BOPO. Dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu akta menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara masing-masing bank syariah dan bank konvensional CAR, ROA, ROE, LDR / FDR, dan BOPO, sementara tidak ada yang signifikan perbedaan antara NPL dan NPF. Dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu objek penelitian yang tidak sama sedangkan persamaan yang dimiliki penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada rasio keuangan, penelitian ini hanya meneliti ROA.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Muhayati[41]yang bertujuan untukmembandingkan dan melihat perbedaan antara bank syariah asingdan bank syariah non-asing dengan menggunakan metode RGEC (Profil Risiko, *Good Corporate*Tata Kelola, Penghasilan, dan Modal).Hasil tes dari *Independent T-test Sampel* menunjukkan tidak ada perbedaankinerja keuangan pertukaran bank syariah asing dengan Bank Islam Non-asingpertukaran dilihat dari aspek profil Risiko (NPF dan FDR), GCG, Penghasilan (ROA), dan(MOBIL). Sementara ada perbedaan kinerja keuangan seperti yang terlihat dari *Earnings* (NOM)aspek.Dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu objek penelitian yang tidak sama sedangkan persamaan yang dimiliki

[41] Yuli Muhayati, "*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Devisa dengan BankSyariah Non Devisa Periode 2012 – 2014*", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.4 No.2, 2017, hlm.101-116 dalam http://www.e-journal.unair.ac.id diakses pada 15 Januari 2020

penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada rasio keuangan, penelitian ini hanya meneliti ROA.

Dari beberapa penelitian di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini maka akan ditemukan persamaan dan perbedaannya. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti pengaruh inflasi dan BI *rate* terhadap *return on assets* ataupun keuntungan bank. Terdapat persamaan pada sumber data dan teknik analisis data yang digunakan. Sumber data dari penelitian ini maupun penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing bank yang bersangkutan. Dan rata-rata dari penelitian di atas juga menggunakan analisis uji beda *independent sample t-test* teknik analisis datanya.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kompleksitas variabel bebas yang digunakan. Variabel bebas dalam penelitian ini hanya mengacu pada inflasi dan BI *rate*, tetapi dalam penelitian sebelumnya variabel bebas yang diteliti lebih beragam, seperti CAR, BOPO, NPM, LDR, dan ROA dari penelitian Setyaningsih dan Muchlish.

F. Kerangka Konseptual

Judul dari penelitian ini yaitu studi komparasi inflasi dan BI *rate* terhadap *Return On Assets* pada PT Bank Muamalat Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah. Variabel penelitiannya yakni inflasi (X_1), BI *rate* (X_2), dan *return on assets*(Y)pada PT Bank Muamalat Indonesia dengan PT Bank BRI Syariah. Rumusan masalahnya yakni: Apakah terdapat perbedaan antara inflasi dan BI *rate* terhadap*return on assets*PT Bank Muamalat Indonesia dengan PT Bank BRI Syariah?. Berikut kerangka konseptual penelitian dengan judul di atas.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian

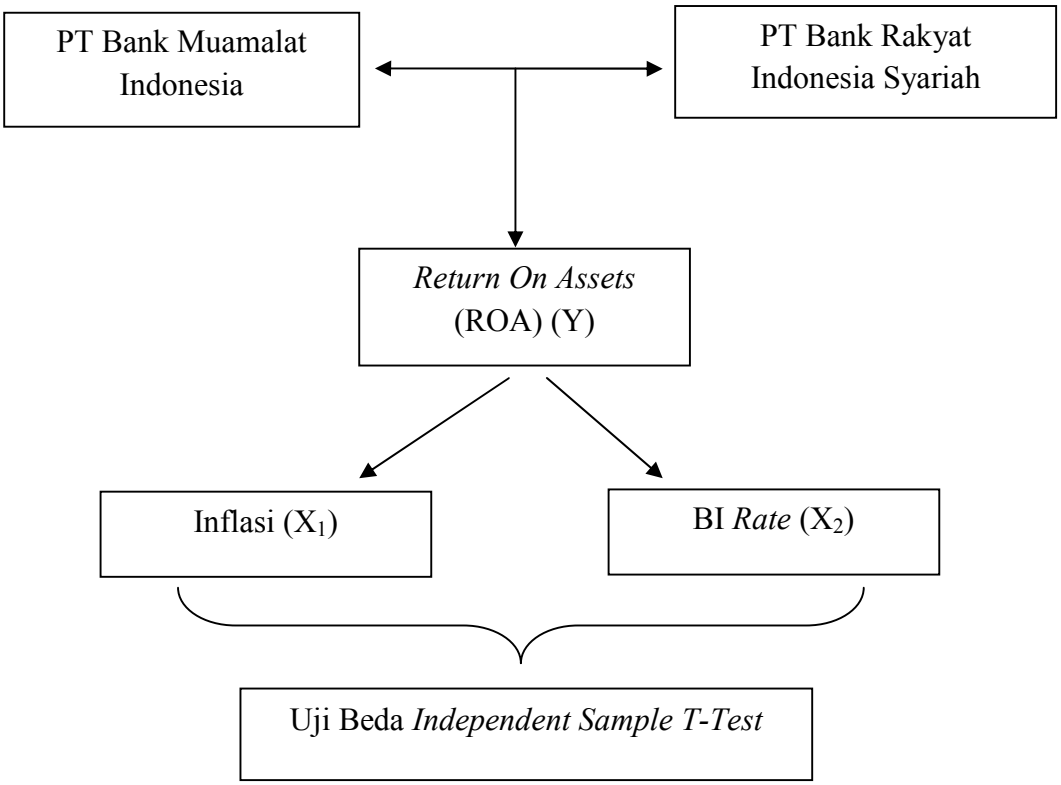

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis bisa diartikan sebagai proposisi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau variabel (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.[42] Hipotesis juga dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.[43] Berdasarkan penelitian terdahulu Inflasi (X_1) dan BI *Rate* (X_2) *Return On Assets* (Y)PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Rakyar Indonesia Syariah kerangka konsep diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H_0: Tidak ada perbedaan antara Inflasi dan BI *rate*terhadap *return on sssets* PT Bank Muamalat Indonesia dengan PT Bank BRI Syariah.

H_1: Ada perbedaan antara Inflasi dan BI *rate*terhadap *return on assets* PT Bank Muamalat Indonesia dengan PT Bank BRI Syariah.

---

[42] Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi danPraktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm.46

[43] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm.64